



Kebangkitan Kewarganegaraan Digital: Dinamika Respon Warganet Terhadap Kebijakan Kenaikan BPJS Kesehatan di Ruang Publik Digital

Mira Karina Justicia ¹⁾, Wijayanto ²⁾

Universitas Diponegoro
Jl. Imam Bardjo, SH, No. 1 Semarang, Indonesia

mirakarinaj@gmail.com ¹⁾
wijayanto@live.undip.ac.id ²⁾

Abstrak

Pada 5 Mei 2020 Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan dengan menerbitkan Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan padahal sebelumnya MA telah membatalkan kenaikan iuran BPJS. Hal tersebut memunculkan reaksi warganet di berbagai platform media sosial khususnya Twitter. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dinamika respon warganet, sejauh mana respon tersebut merefleksikan kesadaran akan hak-hak kewarganegaraan terutama hak akses kesehatan, dan bagaimana respon tersebut mempengaruhi media arus utama di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah (1) analisis media sosial, (2) analisis isi media arus utama, dan (3) etnografi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa telah muncul satu jenis kewarganegaraan digital yang terefleksi dari protes warganet di ruang digital sebagai bagian dari upaya menuntut pemenuhan hak atas layanan kesehatan sebagai bagian dari hak asasi mereka sebagai warga negara yang tertulis dalam konstitusi kita. Upaya untuk mengklaim hak kesehatan ini terwujud dalam tindakan kewargaan (act of citizenship) di ruang publik digital mulai dari witnessing hingga flaming yang pada gilirannya turut mempengaruhi pemberitaan media arus utama yang melahirkan satu diskursus di ruang publik yang lebih luas.

Kata kunci: BPJS; kenaikan; kewarganegaraan; respon; warganet

Abstract

This paper examines the dynamics of netizens' responses to the BPJS Health tariff increase policy in the digital public space. As is known, on May 5, 2020 Jokowi increased BPJS Health contributions by issuing Presidential Decree No. 64 of 2020 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation No. 82 of 2018 concerning Health Insurance even though the Supreme Court had previously canceled the increase in BPJS contributions. This gave rise to netizen reactions on various social media platforms, especially Twitter. The question then is, how is the dynamics of the netizen's response, the extent to which the response reflects awareness of citizenship rights, especially the right to health access, and how this response affects the mainstream media in Indonesia. The research methods used in this paper are (1) social media analysis, (2) mainstream media content analysis, and (3) digital ethnography. The results of the study show that a type of digital citizenship has emerged which is reflected in the protests of netizens in the digital space as part of their efforts to demand the fulfillment of the right to health services as part of their human rights as citizens written in our constitution. This effort to claim the right to health is manifested in acts of citizenship in the digital public space, from witnessing to flaming which in turn also influences mainstream media coverage which creates a discourse in the wider public sphere.

Key words: BPJS; increase; citizenship; response; netizen



PENDAHULUAN

Presiden Jokowi menaikkan iuran BPJS pada 5 Mei 2020. Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 64 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Sebelumnya pada akhir Desember 2019, iuran BPJS dinaikkan melalui Perpres Nomor 75 tahun 2019, namun per 1 April dibatalkan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020.

Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang kenaikan iuran BPJS menyalahi putusan MA, alasan MA membatalkan Perpres lama bukan karena besaran nominalnya tetapi langkah yang diambil pemerintah dalam menaikkan iuran BPJS. Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial pada warga Negara sebagai upaya untuk mewujudkan amanat yang terdapat pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana tercantum pada pasal 28 H ayat (1) dan (2). Kemudian pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sebagaimana tercantum pada pasal 34 ayat (3).

Hal ini yang menjadi pertanyaan, mengapa Presiden tetap menaikkan iuran BPJS? Kenaikan BPJS ini dirasa tidak tepat mengingat kita tengah dilanda pandemi Covid19. Meskipun kenaikan hanya ditujukan kepada kelas I dan II, namun kelompok ini juga terkena imbas ekonomi karena kondisi pandemi Covid19. Kelompok/golongan ini masih membutuhkan keringanan, mengapa masih harus dinaikkan? Kebijakan mengenai kenaikan BPJS menjadi sorotan publik dan menuai berbagai macam reaksi dari warganet.

Era digital telah membentuk warga negara digital yang dalam kehidupan sehari-hari terbiasa menggunakan internet sebagai sebuah kebutuhan. Warga digital didefinisikan sebagai warga Negara yang terbiasa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi guna mendapatkan informasi politik demi memnuhi kewajiban sebagai warga Negara (Karen Mossberger, 2007).

Pesatnya perkembangan teknologi telah merambah ke seluruh dunia, termasuk Indonesia (Triastuti, 2016). Selain itu perkembangan teknologi informasi memunculkan konsep kewarganegaraan digital. Mike Ribble dan Gerad menyebutkan kewarganegaraan digital *the positive aspects of technology so that everyone can work and play in this digital world* (Bailey, 2007).

Indonesia masuk dalam lima besar Negara dengan pengguna media sosial tertinggi di dunia (Ambardi, 2014). Berbagai penelitian menunjukkan pengguna media sosial di Indonesia yang semakin membesar dari tahun ke tahun. Berdasarkan polling yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia tumbuh 10,12%. Survey ini melibatkan sebanyak 5.900 sampe dengan margin of error 1,28%. Data lapangan yang diambil selama periode Maret hingga 14 April 2019. Dari total populasi sebanyak 264 juta jiwa penduduk Indonesia, ada sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8% sudah terhubung ke internet.

Dalam penggunaannya media sosial merupakan media alternatif untuk berekspresi, bahkan media sosial sudah menjadi alat utama dalam kebebasan berekspresi. Berbagai isu dan permasalahan yang berkembang di masyarakat ramai di perbincangkan di media sosial yang menimbulkan banyak perbincangan dan dapat mempengaruhi publik dalam menentukan sikap serta memunculkan ekspresi *sentiment* seperti positif, negatif dan netral bahkan berita hoax. Melalui permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat ini warga dapat memperjuangkan kepentingannya dengan bebas, tanpa tekanan dari pihak manapun termasuk pemerintah. Dalam konteks ini gerakan sosial berbasis internet muncul ke permukaan demi memperjuangkan hak dan kepentingan warga di berbagai bidang.

Kemunculan kewarganegaraan digital di Indonesia tidak hanya sebagai kemampuan untuk berpartisipasi dalam lingkungan online dari perilaku etis yang ditentukan (Karen Mossberger, 2007) tetapi sebagai serangkaian tindakan yang menunjuk subjek politik yang muncul dari pertemuan antara negara dan warganya di internet dan di media sosial (Isin, 2015).



Pengembangan kewargaan digital adalah untuk menciptakan masyarakat pengguna teknologi digital dapat dengan baik dan pintar mengevaluasi penggunaan teknologi mereka sendiri untuk menjadi anggota yang produktif dari masyarakat digital (Baehaqi Arif, 2016).

Contoh kasus Prita Mulyasari dengan Rumah Sakit Omni Internasional merupakan salah satu bukti bahwa gerakan sosial di Indonesia telah membangkitkan simpati publik. Dalam ranah demokrasi, internet dan media sosial dapat memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai isu (Nuswantoro, 2015). Selain itu kasus permohonan maaf Ratna Sarumpaet juga mendapat reaksi dari warganet (Dodalqa, 2020). Reaksi dari ratusan ribu warga telah meningkatkan kesadaran warga dan perjuangan warga melawan ketidakadilan dari pemerintah dan juga peran media digital dalam gerakan warganet cukup besar (Wijayanto, 2020).

Istilah kewarganegaraan baru-baru ini mungkin sebagian disebabkan oleh berbagai penafsirannya. Beberapa menafsirkan kewarganegaraan dalam hal realisasi hak, seperti definisi Hannah Arendt tentang 'hak untuk memiliki hak' (Somers, 1995). Kewarganegaraan kemudian mengacu pada hubungan antara seseorang dan komunitas politik, yang dicirikan oleh hak dan kewajiban bersama, dan diaktifkan oleh peran yang dimainkan orang tersebut dalam kehidupan politik komunitas itu.

Hubungan ini idealnya diabadikan dalam undang-undang, yang mendefinisikan hak-hak dasar warga negara tentang properti, identitas, keamanan dan kesejahteraan dan melindungi warga negara individu dari negara serta terhadap sesama warga negara. Yang lain menekankan bahwa kewarganegaraan adalah tentang keanggotaan individu dalam komunitas politik: kewarganegaraan adalah keanggotaan pasif dan aktif individu dalam negara-bangsa dengan hak dan kewajiban universalistik tertentu pada tingkat kesetaraan tertentu (Janoski, 1998).

Keterlibatan bisa berupa keterlibatan yang secara mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimiliki dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan (Atuti, 2009). Kemampuan media sosial dapat berfungsi untuk meningkatkan skala, ruang lingkup, dan ketepatan disinformasi (Howard, 2019). Apalagi peran partisipasi warganet di media sosial memberi pengaruh positif bagi kesuksesan aktivisme politik (Lim, 2013).

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Zamzam Fauzanafi (2016) dengan judul *Searching for Digital Citizenship: Fighting Corruption in Banten, Indonesia*. Penelitian ini mempertanyakan bagaimana bentuk-bentuk baru kewarganegaraan diwujudkan melalui tindakan digital yang didefinisikan sebagai tindak tutur yang diucapkan melalui penggunaan media sosial. Penelitian ini menyajikan tindakan digital warga dalam kampanye antikorupsi melawan rezim patrimonial dan klientelistik dinasti politik Banten yang sebagian besar dipentaskan di Facebook dan platform online lainnya. Tindakan digital ini menghasilkan dan mengintensifkan publik yang afektif melalui bentuk kewarganegaraan digital yang diberlakukan untuk menentang dinasti yang korup.

Penelitian yang ditulis oleh Wijayanto, Hendra Try Ardianto dan Esther Sri Astuti (2020) dengan judul *Campaigning Online and Offline: The use of YouTube Movie in the Movement Against Environmental Destruction in the Movie "Samin vs Semen"*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran media digital dalam gerakan melawan perusakan lingkungan pada kasus pabrik semen di Kendeng, Rembang. Hasil penelitian menemukan sebagai berikut: Pertama, film tersebut membingkai masyarakat Samin sebagai pembela perlindungan lingkungan di Pegunungan Kendeng. Sedangkan pabrik semen dijebak sebagai pelaku perusakan lingkungan di kawasan Kendeng. Dengan demikian, konflik antara masyarakat Samin dan pabrik semen dibingkai sebagai konflik antara kebaikan dan kejahatan. Kedua, film yang diunggah sudah ditonton ratusan ribu kali oleh warganet, disukai ribuan orang dan dikomentari ratusan. YouTube telah meningkatkan kesadaran warga tentang adanya perusakan lingkungan dan pemberantasannya serta telah menyediakan kutipan untuk diskusi tentang masalah tersebut. Terakhir, film yang diunggah di YouTube telah digunakan sebagai instrumen konsolidasi internasional di kalangan masyarakat Samin,



mempengaruhi setting agenda media nasional dan internasional serta meluaskan gerakan protes terhadap pabrik semen baik di tingkat nasional maupun internasional.

Penelitian terdahulu yang merupakan jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian penulis menjadi acuan penulis dalam memperkaya referensi dalam penelitian ini. Tulisan ini mengulik dinamika respon warganet di ruang publik digital terkait kenaikan tarif BPJS Kesehatan, menganalisis respon tersebut merefleksikan kesadaran hak akses kesehatan dan pengaruh respon warganet terhadap media arus utama di Indonesia. Tulisan ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan berpikir terutama pengetahuan mengenai kebangkitan kewarganegaraan dilihat dari dinamika respon warganet terhadap kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di ruang publik digital dan terciptanya warga negara untuk lebih melek terhadap isu-isu yang sedang berkembang saat ini.

METODE

Studi ini adalah penelitian dengan metode analisis media sosial, analisis media arus utama dan etnografi digital. Jenis data yang digunakan penelitian ini yaitu data kualitatif. Sumber data penelitian berasal dari data Twitter. Twitter dipilih oleh karena lebih sering digunakan sebagai sumber data daripada media sosial lain seperti Facebook karena lebih mudah untuk mengekstraksi informasi. Hal ini membuat data Twitter banyak digunakan dalam kajian opini publik. Data Twitter penelitian ini diperoleh melalui sistem Drone Emprit yang merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk memonitor serta menganalisa media sosial dan platform online berbasis teknologi big data. Drone Emprit mampu menyajikan peta *Social Network Analysis* tentang bagaimana sebuah hoax berasal, menyebar, siapa influencers pertama dan siapa grupnya. Untuk bisa menggali data di mesin pencari, digunakan alat bantu berupa kata kunci antara lain: BPJS, kenaikan, Kewarganegaraan, tarif, premi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Respon Warganet Terhadap Kenaikan Tarif Permi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Ruang Publik Digital

Presiden Jokowi telah menaikkan iuran BPJS pada 5 Mei 2020 dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 64 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Berikut rinciannya:

Iuran peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp 150.000 dari Rp 80.000

Iuran peserta mandiri kelas II juga naik dari Rp 100.000 dari Rp 51.000

Iuran peserta mandiri kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Pada kelas III pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga dibayarkan tetap 25.500. Namun pada tahun 2021 subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah berkurang menjadi Rp 7.000 sehingga yang harus dibayarkan peserta adalah sebesar Rp 35.000.

Sebelumnya pada tahun 2019 Presiden Jokowi sempat menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan dengan Perpres nomor 75 tahun 2019 tentang jaminan Kesehatan. Namun Mahkamah Agung membatalkan kenaikan tersebut.

Kenaikan tersebut mendapat banyak sorotan netizen di semua platform media mulai dari media sosial Twitter, Facebook, Youtube dan Instagram hingga media daring dengan total 115.599 percakapan. Dari seluruh percakapan volume yang paling besar terjadi di Twitter dengan total 101.745 percakapan.

Terkait dengan dinamika respon warganet terhadap kenaikan tarif premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di ruang publik digital khususnya platform media sosial Twitter, peneliti melakukan analisis media sosial. Dalam hal ini peneliti menggunakan alat pencari yang disediakan secara gratis oleh Drone Emprit (Media Kernel Indonesia). Dari seluruh percakapan di Twitter, penelitian ini menemukan sentimen negatif dari warganet yang muncul dengan persentase lebih besar daripada mereka yang memiliki sentimen positif. Periode analisa dari tanggal 5 Mei hingga 25 Mei 2020.



Tabel Periode Analisis

No.	Periode Analisis	Sentimen Positif	Sentimen Negatif	Jumlah Percakapan
1.	5-13 Mei 2020	54%	42%	21,396
2.	14-25 Mei 2020	44%	50%	80,349
3.	5-25 Mei 2020	46%	48%	101,745

Dari tiga periode yang dianalisis terdapat dinamika respon warganet yang perlu dicatat. Pada periode pertama adalah periode ketika Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan baru saja diputuskan. Terdapat 21 ribu percakapan dengan sentiment negative 42% dan positif 54% yang menandakan hampir separuh dari 21 ribu orang menolak adanya kenaikan BPJS Kesehatan.

Kemudian muncul pemberitaan di berbagai media mengenai kenaikan BPJS dan viral menjadi headline yang mengakibatkan perubahan reaksi public pada periode kedua. Di sini percakapan mengalami lonjakan cukup tinggi menjadi 80 ribu percakapan. Seiringan dengan percakapan yang naik, sentiment negative juga mengalami kenaikan menjadi 50% dan positif turun 44%. Tampak bahwa pemberitaan media menjadikan topic kenaikan BPJS sebagai headline ikut membawa pengaruh pada lonjakan sentiment negative.

Periode ketiga merupakan penggabungan periode I dan II dengan total 101.745 percakapan dengan sentiment negative 48% sedangkan positif 46%. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan hampir separuh warganet yang menunjukkan sentiment negative menandakan bahwa mayoritas warganet menolak kenaikan BPJS Kesehatan.

Dibarengi dengan sentiment negative, kebijakan kenaikan BPJS Kesehatan ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah. Hal tersebut terlihat dari sisi emosi yang menonjol dari percakapan warganet yaitu ketidakpercayaan (*distrust*). Terdapat 5.800 unggahan terkait ketidakpercayaan tersebut. Kebijakan ini justru menerbitkan distrust yang semakin tinggi pada pemerintah.

Pada sisi narasi menunjukkan bahwa dapat diambil makna bahwa pertanyaan utama dari publik adalah berkisar pada persoalan: Pertama, inkonsistensi yang terjadi karena sebelumnya pada akhir Desember 2019 iuran BPJS dinaikkan melalui Perpres Nomor 75 tahun 2019, namun per 1 April dibatalkan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020. Kedua, "timing" kenaikan tarif yang beriringan dengan pandemic covid19. Kenaikan BPJS ini dirasa tidak tepat mengingat kita tengah dilanda pandemic Covid19 meskipun kenaikan hanya ditujukan kepada kelas I dan II namun kelompok ini juga terkena imbas ekonomi karena kondisi pandemic Covid19. Ketiga, kekecewaan public yang mengharapan Jokowi untuk tidak mengambil kebijakan seperti ini.

Pada percakapan kenaikan BPJS Kesehatan ini sangat sedikit ditemukan akun robot yang terlibat, dengan score 1,79 menunjukkan bahwa akun yang terlibat adalah akun organic (manusia). Sangat sedikit ditemukannya akun robot yang terlibat perdebatan, beberapa akun yang paling berpengaruh dan mendapat banyak retweet adalah @CNNIndonesia, @tengkudzul, @dandhywilaksono, @tsembiring, @amin_rais, @prastowo, @teddygusnaidi.

Dari ratusan ribu percakapan di media sosial khususnya Twitter tentang kenaikan BPJS Kesehatan pada tahun 2020, munculnya satu jenis kewarganegaraan baru yang terefleksi dari protes warganet di ruang publik digital sebagai bagian dari upaya untuk menuntut pemenuhan hak (*claiming right*) atas layanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga negara. Ketentuan itu ada dalam konstitusi kita, negara berkewajiban menyelenggarakan satu sistem jaminan sosial. Tindakan para warganet di ruang publik digital disebut tindakan kewarganegaraan yang merupakan suatu upaya untuk mengklaim hak kesehatan mereka dan juga hal itu menunjukkan penguatan kesadaran public terhadap hak-hak mereka.



Seperti dikatakan oleh Fauzan bahwa kewarganegaraan digital tidak hanya sebagai kemampuan untuk berpartisipasi dalam lingkungan online dari perilaku etis yang ditentukan, tetapi sebagai serangkaian tindakan yang menunjuk subjek politik yang muncul dari pertemuan antara negara dan warganya di Internet dan dalam kegiatan sosial media. Kumpulan tindakan ini dipahami sebagai tindakan digital yang semua tindak tutur yang diucapkan melalui aktivitas online seperti blogging, olahpesan, email, tweeting, posting, menyukai, dan berkomentar (Fauzanafi, 2016).

Dampak Respon Warganet Mempengaruhi Pemberitaan Di Media Arus Utama

Isu kenaikan BPJS Kesehatan yang sampai trending di Twitter mempengaruhi pemberitaan di media arus utama. Beberapa dari media arus utama memberitakan isu kenaikan BPJS Kesehatan dengan sentiment yang negatif. Media CNNIndonesia pada hari Rabu 13 Mei 2020 dengan judul "Iuran BPJS Naik Lagi, Masyarakat Merasa Kena Prank Jokowi". Dalam artikel tersebut memuat pernyataan salah satu peserta mandiri kelas II BPJS Kesehatan, ia mengaku kecewa dengan prank Jokowi padahal ia sempat senang ketika MA membatalkan kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Ia mengharapkan Jokowi tidak mengeluarkan kebijakan yang maju mundur yang justru memberi ketidakpastian pada masyarakat.

Selain itu media arus utama lain yaitu dari Detik pada hari Rabu 13 Mei 2020 dengan judul "BPJS Kesehatan Naik Lagi, Warga Twitterland Meradang" berisi tentang beberapa cuitan warga Twitterland. Senada dengan Merdeka.com yang juga memberitakan pada Jumat 15 Mei 2020 dengan judul "Iuran BPJS Kesehatan Naik, AHY Sebut Rakyat Sudah jatuh Tertimpa Tangga".

SIMPULAN DAN SARAN

Topik kenaikan BPJS Kesehatan menjadi sorotan publik di berbagai media sosial maupun media daring selama hampir 1 bulan. Terjadi dinamika diantara 3 periode analisis. Hal ini merupakan pertanda positif semakin menguatnya kesadaran publik terkait hak-hak mereka dan pertanda dari adanya satu kesadaran kewarganegaraan baru yang penting bagi pematangan demokrasi. Kesadaran kewarganegaraan terrefleksi dari protes warganet di ruang digital yang merupakan bagian dari upaya untuk menuntut pemenuhan hak (*claiming rights*) atas layanan kesehatan sebagai salah satu bagian dari hak asasi mereka sebagai warga negara sebagaimana tertulis dalam konstitusi. Upaya untuk mengklaim hak kesehatan ini terwujud dalam tindakan kewargaan (*act of citizenship*) di ruang publik digital mulai dari *witnessing* hingga *flaming* yang pada gilirannya juga turut mempengaruhi pemberitaan media arus utama.

Kewarganegaraan baru ini menekankan pada pemenuhan hak warga Negara sebagai sesuatu yang sama pentingnya dengan kewajiban. Sejak lahir manusia telah memiliki hak-hak yang melekat padanya, seperti hak untuk hidup, maka hak itu diandaikan telah ada terlebih dahulu sebelum kewajiban. Kewarganegaraan yang diusung oleh konsep ini berbeda seratus delapan puluh derajat dengan konsep kewarganegaraan yang telah diajarkan oleh rezim order baru selama puluhan tahun, yang masih lekat dalam pikiran bawah sadar kita hingga hari ini.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada 4 dosen penguji yang telah memberikan masukan kritis bagi penyempurnaan gagasan artikel ini : Dr. Sos. Dra. Fitriyah, M.S, Dr. Laila Kholid Alfordaus, S. IP., M. PP., Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol. Admin., Dr. Dra. Kushandajani, M.S.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambardi, K. (2014). *Mapping Digital Media : Indonesia* . London: Open Society Foundation.
Atuti, S. I. (2009). *Desentralisasi Partisipasi dan Pendidikan*. Yogyakarta: UNY.
Baehaqi Arif, D. &. (2016). *Kewarganegaraan Digital, Penguatan Wawasan Global Warga Negara dan Peran PPKN*. . *Prosiding Seminar Nasional Kongres dan Deklarsi AP3Knl*.



- Bailey, M. R. (2007). *Digital Citizenship in Schools*. Eugene: International Society for Technology in Education.
- Dodalqa, M. C. (2020). "Satir" Antara kritik dan Selebrasi (Analisis Reaksi Warganet Terhadap Permohonan Maaf Ratna Sarumpaet). *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media dan Cinema*.
- Fauzanafi, M. Z. (2016). *Searching for Digital Citizenship: Fighting Corruption in Banten, Indonesia*. Research Workshop.
- Howard, S. B. (2019). *The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation*. Project on Computational Propaganda.
- Isin, E. &. (2015). *Being Digital Citizens*. London: Rowman & Littlefield International.
- Janoski, T. 1998. *Citizenship and Civil Society: A Framework of Rights and Obligations in Liberal, Traditional, and Social Democratic Regimes*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Karen Mossberger, C. J. (2007). *Digital Citizenship: The Internet, Society, and Participation*. The MIT Press.
- Kompas Tekno. 2019. APJII: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa. Retrieved from <https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa>
- Lim, M. (2013). Many Click but Little Stick: Social Media Activism in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*.
- Nuswantoro, A. R. (2015). Politik Internet Indonesia: Ide Bebas Terhadap Perkembangan Politik, Ekonomi, dan Demokrasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*.
- Triastuti, R. (2016). *Fostering Digital Citizenship in Indonesia. Prosiding ICTTE FKIP UNS 2015*, (pp. Vol I, Nomor 1, Januari 2016).
- Sommer, R Margaret. (1995). *Theorizing citizenship Rights and Statelessness*. Cambridge University press
- Wijayanto, H. T. (2020). *Campaigning Online and Offline: The use of Youtube Movie in the Movement Against Environmental Destruction in the Movie "Samin vs Semen"*.